

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

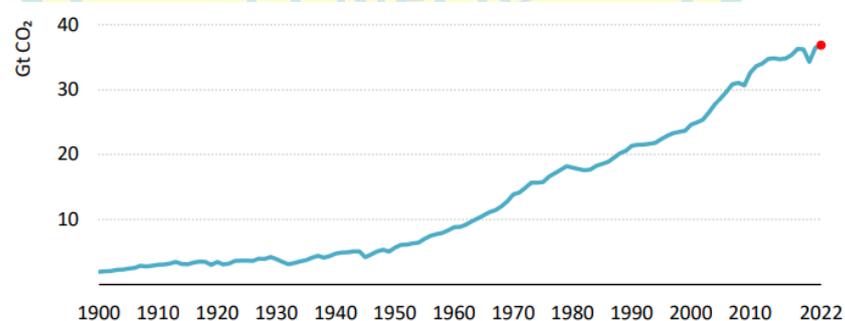
Dampak perubahan iklim tidak terbatas pada ancaman yang potensial di masa depan, tetapi juga telah menjadi masalah mendesak yang sedang terjadi saat ini, dan telah berdampak terhadap komunitas, ekosistem, dan ekonomi global. Salah satu contoh perubahan iklim yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia industri adalah peningkatan suhu global.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa fenomena terkait iklim global. Pada tahun tersebut merupakan tahun terpanas dengan Suhu global rata-rata tahunan mendekati peningkatan $1,5^{\circ}\text{C}$ di atas tingkat pra-industri (*World Meteorological Organization (WMO)*, 2024). Selain itu, terjadi peningkatan suhu global harian yang menyebabkan terjadinya peristiwa gelombang panas dahsyat yang terjadi di banyak bagian Asia dan Eropa (Aditya, 2024). Perubahan iklim berdampak besar terhadap bumi dan seluruh makhluk hidup. Selain itu, dampaknya juga dirasakan di berbagai industri, termasuk sektor pertanian. Adanya perubahan iklim menimbulkan ancaman bagi ketahanan pangan global.

Peningkatan suhu global yang terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia dan industri yang semakin meningkat dan berkembang, seperti pembakaran minyak bumi, bahan bakar fosil dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, pemakaian energi yang berlebihan pun menjadi penyebab dari peningkatan suhu global. Jumlah industri yang semakin meningkat tentunya akan berdampak positif,

karena dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan negara. Namun, dengan semakin meningkatnya industri juga akan menyebabkan masalah lingkungan yang serius, seperti emisi dan perubahan iklim (Frianto et al., 2023).

Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan bisnis telah sangat memperhatikan masalah ini karena industri adalah pelaku utama emisi karbon yang merugikan atmosfer (Tana & Nugraheni, 2021). Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang efek gas rumah kaca seperti karbon dioksida terhadap perubahan iklim di seluruh dunia telah mendorong pemangku kepentingan untuk mempelajari dan mempertimbangkan kinerja perusahaan secara menyeluruh, termasuk aspek keuangan dan konsekuensi lingkungannya. Kasus emisi karbon telah menjadi landasan bagi pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan penilaian kinerja suatu perusahaan. Selain mempertimbangkan kesehatan keuangan dan pertumbuhan perusahaan, evaluasi kinerja kini juga melibatkan penilaian terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perusahaan terhadap dampak lingkungan, termasuk upaya untuk mengurangi jejak karbon mereka.



Gambar 1.1 Emisi Karbon Dioksida (CO_2) Global

Sumber: *International Energy Agency (IEA)*

Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂) pada tahun 2022 yang berasal dari 36,8 gigaton aktivitas industri dan pembakaran energi di seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah emisi meningkat sebesar 0,5 gigaton. Dapat dilihat dari gambar 1.1 bahwa jumlah emisi karbon dioksida tahun 2022 menjadi rekor tertinggi dalam sejarah. Berdasarkan laporan emisi karbon tahun 2022 yang diterbitkan oleh *International Energy Agency* (IEA), sumber dari peningkatan emisi pada tahun 2022 berasal dari pembakaran batu bara yang meningkat sebesar 1,6% menjadi hampir 15,5 gigaton dan emisi yang berasal dari minyak bumi dengan jumlah peningkatan sebesar 2,5% menjadi 11,2 gigaton. Sementara itu, emisi karbon dioksida dari proses industri dan pembakaran gas alam pada tahun 2022 berkurang sebesar 1,6% dan 1,7%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengetatan pasokan gas akibat invasi Rusia ke Ukraina dan terjadi penurunan kinerja industri manufaktur di beberapa wilayah.

Menanggapi isu ini, IEA mendesak perusahaan-perusahaan energi fosil untuk mengurangi emisi mereka. Perusahaan-perusahaan ini diperkirakan akan memikul tanggung jawab bersama, sesuai dengan janji publik yang telah mereka buat untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan energi fosil disarankan untuk mengevaluasi rencana bisnis mereka, dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan mereka sejalan dengan upaya untuk mengurangi emisi (Ahdia, 2023).

Perubahan iklim yang terus berlanjut tanpa intervensi akan menyebabkan kerusakan signifikan terhadap perekonomian global, yang diperkirakan

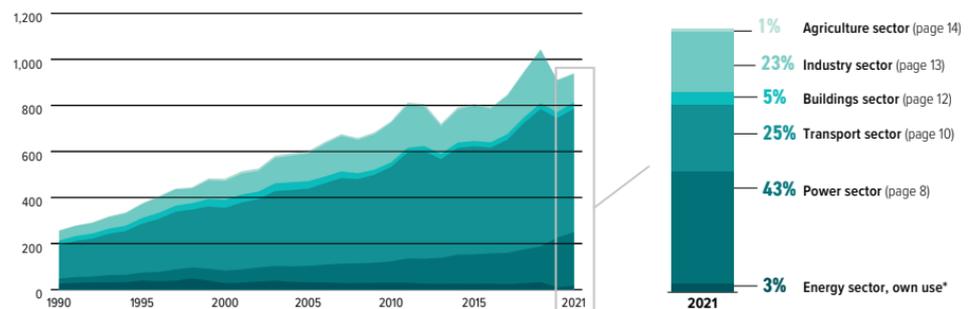
berjumlah US\$178 triliun selama 50 tahun ke depan (Deloitte, 2022). Perkiraan yang mengkhawatirkan ini menekankan perlunya upaya terkoordinasi di tingkat dunia. Mitigasi dampak ekonomi yang parah hanya dapat dicapai melalui transisi yang terencana dan komprehensif menuju pencapaian *net zero emission*.

Menyikapi perubahan iklim yang terjadi di dunia, maka dibuatlah perjanjian Paris pada tahun 2015 yang berisi kesepakatan dan komitmen dengan 195 negara harus mengurangi emisi sambil bekerja sama untuk mempersiapkan dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 untuk mengatasi dampak perubahan iklim secara global. Dalam upaya untuk mencapai hal ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020–2024.

Namun, Indonesia memang berkontribusi besar terhadap emisi karbon. Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan emisi karbon tertinggi di dunia. Berdasarkan penilaian terbaru dari tim ahli *Global Carbon Project* (GCP), negara ini menghasilkan 700 juta ton per tahun (Annur, 2023). Angka tersebut meningkat sebesar 18,3% dari tahun sebelumnya dan juga merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan negara lain.

Energy-related CO₂ emissions by sector

Annual CO₂ emissions (MtCO₂/year)



Gambar 1.2 Persentase Emisi CO₂ Terkait Energi Berdasarkan Sektor

Sumber: *Climate Transparency 2022*

Pada gambar 1.2 memperlihatkan bahwa kontributor terbesar dari emisi CO₂ secara menyeluruh berasal dari pembakaran energi. Sektor tenaga listrik memiliki persentase yang tinggi sebesar 43% yang menandakan bahwa sektor tersebut menjadi kontributor terbesar dalam emisi karbon. Kemudian sebesar 23% emisi karbon berasal dari sektor industri, dan persentase terkecil atau penghasil emisi karbon terendah adalah sektor agrikultur.

Besarnya emisi yang dihasilkan oleh suatu entitas atau industri dipengaruhi oleh aktivitas operasionalnya. Emisi karbon meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan dihasilkan. Hal serupa juga berlaku pada entitas yang menggunakan teknologi, seperti pemanfaatan mesin untuk proses produksi dan moda transportasi. Hal inilah yang menjadi pembeda baik sektor komersial yang intensif karbon maupun yang tidak intensif karbon.

Industri intensif karbon mencakup sektor energi, pertambangan, manufaktur, *basic materials*, utilitas, dan perusahaan transportasi (Ramadhani & Venusita, 2020). Sedangkan industri non-intensif karbon mencakup sektor keuangan, jasa, kesehatan dan investasi (Ramadhani & Venusita, 2020;

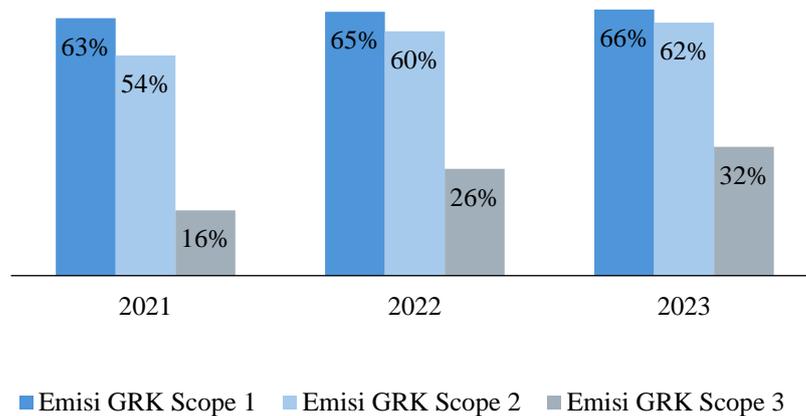
Suminar & Yuliandhari, 2024). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Laporan Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi (2020) sektor industri pun mempunyai peran kontributor utama pelepasan gas rumah kaca, yang berjumlah 21,46% dari keseluruhan emisi pada tahun 2019. Kontribusi yang besar ini menggarisbawahi pentingnya tindakan efektif untuk memitigasi emisi karbon di sektor-sektor tersebut.

Corporate citizenship merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dikaitkan dengan tugas moral terhadap lingkungan dan masyarakat tempat bisnis tersebut beroperasi. Salah satu aspek penting dari *corporate citizenship* adalah keberlanjutan lingkungan, yang mencakup inisiatif untuk memitigasi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim dan emisi karbon. Meningkatnya kesadaran pemerintah, dan masyarakat mendorong perusahaan untuk aktif mengatasi pengurangan emisi karbon dengan melakukan analisis, pengukuran, pencatatan dan pelaporan tingkat emisi karbon secara menyeluruh.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengamanatkan agar laporan keberlanjutan dipublikasikan oleh semua perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Laporan ini secara nyata menampilkan isu-isu lingkungan, dan tindakan untuk mengurangi emisi sebagai indikator penting dari kinerja lingkungan dan komitmen mereka terhadap keberlanjutan (Tianisyah et al., 2024). Meskipun sudah diwajibkan, namun hanya 88% perusahaan di Indonesia yang terdeteksi mengungkapkan risiko dan peluang terkait iklim (PWC, 2023). Artinya, belum secara

menyeluruh perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim.

Pengungkapan Emisi GRK oleh Perusahaan Intensif Karbon



Gambar 1.3 Pengungkapan Emisi GRK oleh Perusahaan Intensif Karbon

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Pengungkapan emisi karbon yang belum dilakukan secara menyeluruh dapat dilihat dari persentase perusahaan khususnya industri intensif karbon sebagai kontributor terbesar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon. Pada gambar 1.3 menunjukkan persentase pengungkapan emisi GRK oleh perusahaan intensif karbon yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu *scope 1*, *scope 2*, dan *scope 3*, dari tahun 2021 hingga 2023.

Pada kategori *scope 1*, pengungkapan emisi GRK menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sampai 2023. Emisi GRK *scope 1* dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh bisnis tersebut termasuk dalam lingkup 1, seperti emisi dari pembakaran bahan bakar fosil dalam proses produksi (misalnya pembakaran batu bara atau gas alam di pabrik), gas buang dari peralatan berat seperti generator atau boiler, serta emisi gas metana dari

aktivitas penambangan batu bara atau produksi minyak. Meskipun tingkat transparansi perusahaan intensif karbon dalam melaporkan emisi GRK *scope* 1 sudah mencapai sekitar 60%, namun angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 35% hingga 40% perusahaan yang belum sepenuhnya transparan dalam melaporkan emisi langsung mereka.

Kemudian, emisi GRK *scope* 2 juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Emisi GRK Lingkup 2 mencakup emisi tidak langsung dari penggunaan panas, uap, atau listrik yang telah dibeli oleh perusahaan. Contohnya meliputi emisi karbon dari listrik yang digunakan untuk menjalankan pabrik atau fasilitas produksi (misalnya, listrik yang dihasilkan dari pembangkit berbasis batu bara), serta emisi dari pemakaian energi untuk penerangan dan pendingin udara di kantor atau fasilitas logistik, seperti gudang. Meskipun tingkat pengungkapan emisi GRK *scope* 2 dapat dikatakan stabil di sekitar 59%, angka tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari perusahaan intensif karbon masih belum mengungkapkan emisi tidak langsung mereka yang berasal dari konsumsi energi.

Pengungkapan emisi GRK *scope* 3 menunjukkan pengungkapan yang paling terendah yang perusahaan lakukan. Emisi GRK Emisi tidak langsung lainnya yang berasal dari lingkup 3 meliputi aktivitas yang terkait dengan operasi perusahaan, tetapi berada di luar kendali langsung perusahaan. Contohnya meliputi emisi dari pengangkutan bahan baku (seperti baja, atau semen untuk perusahaan konstruksi), emisi dari distribusi produk menggunakan jasa pihak ketiga (seperti pengiriman bahan bakar ke pompa

bensin), dan emisi dari penggunaan produk oleh pelanggan (misalnya pembakaran bahan bakar oleh konsumen). Rendahnya tingkat pengungkapan ini menunjukkan bahwa perusahaan masih kesulitan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan emisi yang berasal dari aktivitas hulu dan hilir mereka.

Berdasarkan gambar tersebut, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan emisi karbon tinggi masih jauh dari mengungkapkan emisi karbon mereka sempurna. Meskipun ada peningkatan dari masing-masing *scope*, persentase pengungkapan yang ada menunjukkan fakta bahwa banyak bisnis masih belum sepenuhnya terbuka. Beberapa hal mungkin menjadi penyebabnya atau mungkin perusahaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melaporkan emisi mereka dengan lengkap. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kesadaran, kapasitas, dan komitmen perusahaan untuk memastikan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat mencerminkan dampak lingkungan mereka secara akurat dan komprehensif.

Sebagai bagian penting dari perusahaan, para eksekutif perusahaan seperti manajer semakin mendapatkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengelola dengan baik dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dan perubahan iklim, salah satunya yaitu menggunakan pengungkapan emisi karbon (Gaganis et al., 2021, 2023; Luo et al., 2023). Ditinjau dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai masih tingginya jumlah emisi karbon dan pengungkapan emisi karbon yang belum menyeluruh dapat diartikan bahwa hal ini disebabkan oleh rendahnya

kemampuan manajerial. Karna pengungkapan informasi emisi karbon perusahaan sangat bergantung pada pilihan manajerial perusahaan (Laksani et al., 2021). Kurangnya pengetahuan teknis dan kesadaran lingkungan manajerial menjadi salah satu hambatan utama pengungkapan emisi karbon secara efektif. Manajer yang kurang memahami isu-isu lingkungan, terutama terkait pengukuran dan pelaporan emisi karbon, cenderung tidak memprioritaskan pengungkapan ini dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

Estimasi yang lebih akurat sering kali dibuat oleh manajer dengan kemampuan kognitif lebih tinggi daripada yang kurang (Ng & Daromes, 2016). Hal ini menunjukkan peran penting manajer dalam ketahanan dan keberlanjutan perusahaan menghadapi perubahan iklim, karena kapasitas mereka dalam memahami dan merespons ancaman iklim. Beberapa penelitian, seperti Lee et al., (2023); Luo et al. (2023) menunjukkan bahwa memiliki keterampilan kepemimpinan akan menguntungkan pengungkapan emisi karbon. Manajer dengan kompetensi tinggi di Korea dan 55 negara lainnya lebih cenderung mengungkapkan informasi lingkungan terkait emisi karbon. Namun, hasil penelitian Hakim (2024) berbeda, yang menyatakan kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap *environment*, *social*, dan *governance*.

Meskipun permasalahan terkait isu-isu lingkungan ini semakin diprioritaskan oleh berbagai kalangan, namun di Indonesia, penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana kemampuan manajer dapat mengungkapkan informasi terkait permasalahan ini masih sangat terbatas. Oleh

sebab itu, terbatasnya penelitian terkait kemampuan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon menjadi motivasi pada penelitian ini.

Keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan masalah lingkungan dapat diartikan sebagai pencapaian kinerja lingkungan yang baik. Ketika perusahaan memperoleh penilaian PROPER yang tinggi, kontribusi mereka terhadap lingkungan semakin besar, yang memotivasi bisnis untuk memberikan lebih banyak informasi dan detail. Dedikasi bisnis ditunjukkan dalam nilai PROPER yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dalam pengelolaan lingkungan, melibatkan berbagai aspek seperti pengelolaan air, limbah, dan efisiensi energi. Namun, meskipun organisasi yang berkinerja baik dalam hal lingkungan umumnya berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan, hal ini tidak selalu menjamin kesuksesan dalam mengatasi masalah emisi karbon secara komprehensif.

Pengurangan emisi karbon memerlukan pendekatan yang lebih spesifik, termasuk pengelolaan sumber emisi yang langsung terkait dengan proses produksi dan konsumsi energi. Ini menunjukkan bahwa meskipun peringkat PROPER yang tinggi mencerminkan pengelolaan lingkungan yang baik, pengelolaan dan pengungkapan emisi karbon tetap menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan. Menurut Yesiani et al. (2024) perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung memberikan informasi tentang kinerja mereka secara sukarela, termasuk upaya pengurangan emisi karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Namun, meskipun perusahaan dengan peringkat PROPER tinggi sering mengadopsi kebijakan lingkungan yang lebih ramah,

mereka masih menghadapi hambatan terkait keterbatasan teknologi, ketergantungan pada energi fosil, dan kurangnya pengetahuan manajerial dalam pengukuran serta pelaporan emisi karbon.

Fenomena ini juga tercermin dalam pengungkapan emisi karbon perusahaan pada gambar 1.3, di mana meskipun mereka memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang baik, tingkat transparansi dan pengungkapan emisi karbon, khususnya emisi *scope 2* dan *scope 3*, masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mitigasi, perusahaan masih menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak penuh dari aktivitas mereka terhadap emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Dani & Harto (2022); Loru (2023); Rusmana & Purnaman (2020); Yesiani et al. (2024) mengindikasikan Kinerja lingkungan dan pengungkapan emisi karbon berkorelasi positif. Artinya, perusahaan yang berkomitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan cenderung melaporkan emisi karbon mereka dengan lebih aktif. Berseberangan dengan hal itu, hasil penelitian Amaliyah & Solikhah (2019); Selviana & Ratmono (2019); Warsiati et al. (2023) temuan menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon tidak dipengaruhi oleh kinerja lingkungan.

Pengungkapan emisi karbon di Indonesia hingga saat ini masih dilakukan secara sukarela karena belum ada aturan yang secara spesifik mengatur detail komponen yang harus diungkapkan. Proses ini pun membutuhkan sistem pengukuran internal yang andal, strategi yang matang, serta biaya yang besar, sehingga tidak semua perusahaan bersedia menyampaikan informasi terkait

emisi karbonnya (Afnilia & Astuti, 2023; Asyari & Hernawati, 2023). Padahal, pengungkapan emisi karbon memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang diperlukan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja emisi karbon perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat (Amelia & Prasetyo, 2022). Urgensi pengungkapan karbon inilah yang menjadi dorongan untuk melakukan penelitian ini.

Pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tata kelola perusahaan yang berperan dalam menentukan tingkat pengungkapan tersebut (Firmansyah et al., 2021). Salah satu aspek tata kelola perusahaan adalah ukuran dewan komisaris (Grediani et al., 2020). Implementasi pengungkapan emisi karbon yang efektif diperlukan tata kelola perusahaan yang mendukung dan memprioritaskan tanggung jawab dan transparansi lingkungan.

Tata kelola berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan memprioritaskan standar etika, mematuhi peraturan, dan mempertimbangkan seluruh kepentingan termasuk lingkungan. Dewan komisaris mempunyai peran penting dalam menentukan arah strategis organisasi dan mengawasi penerapan strategi perusahaan oleh manajemen. Oleh sebab itu, dewan komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat aturan dan regulasi mengenai berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk transparansi dalam pengungkapan informasi lingkungan.

Perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih besar menandakan bahwa perusahaan tersebut dapat melaksanakan informasi tentang lingkungan,

termasuk pengungkapan emisi karbon (Zanra et al., 2020). Namun pernyataan tersebut tidak berlaku jika mempertimbangkan jumlah Emisi karbon masih belum diungkapkan secara luas, seperti yang terlihat di gambar 1.3. Perusahaan-perusahaan intensif karbon Jumlah dewan komisaris di Indonesia cukup banyak, namun keberadaan dewan komisaris tersebut belum efektif sementara mereka memenuhi kewajiban dan tugasnya terkait emisi karbon. Keberadaan dewan komisaris yang lebih besar tidak secara otomatis menjamin peningkatan pengawasan atau efektivitas pelaporan lingkungan hidup.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Grediani et al. (2020); Mustar et al. (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berdampak positif pada pengungkapan emisi. Sedangkan menurut Kurniawan & Rusli (2020); Puspita & Tanjaya (2022) tingkat pengungkapan emisi karbon tidak terpengaruh oleh jumlah anggota komisaris yang terdapat di suatu perusahaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa ditemukan adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu dan terdapat permasalahan pada variabel kemampuan manajerial, kinerja lingkungan, dan dewan komisaris yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan kembali ketiga variabel tersebut dengan fokus pada perusahaan sektor perindustrian, *basic materials*, infrastruktur, energi, transportasi dan logistik dapat diakses melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti ilmiah tentang dampak kemampuan manajerial, kinerja lingkungan, dan dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

literatur akuntansi mengenai pengungkapan emisi karbon, khususnya di Indonesia, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wawasan akademik di bidang tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis dalam menyusun laporan keberlanjutan dan laporan tahunan yang mencakup pengungkapan emisi karbon.

Lebih lanjut, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menganalisis kemampuan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon dengan menggunakan sampel perusahaan di Indonesia, dengan merujuk pada literatur yang menggunakan sampel penelitian internasional (Lee et al., 2023; Luo et al., 2023). Mengacu pada penjelasan sebelumnya dan fenomena yang ada, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kemampuan Manajerial, Kinerja Lingkungan, dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Peneliti menemukan adanya kesenjangan penelitian, yaitu berupa ketidakkonsistenan temuan sebelumnya dan minimnya penelitian tentang pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kemampuan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengevaluasi dan menilai bagaimana keterampilan manajemen mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.
2. Menilai bagaimana kinerja lingkungan mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori pemangku kepentingan, yang menekankan kewajiban bisnis untuk memenuhi ekspektasi berbagai kelompok kepentingan, seperti pemegang saham dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ekspektasi pemangku kepentingan melalui praktik pengungkapan emisi karbon perusahaan dapat

meningkatkan nilai perusahaan dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan pemangku kepentingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam merancang ataupun memperbarui kebijakan yang lebih efektif dan efisien mengenai upaya penurunan emisi karbon dan perbaikan mengenai standar pengungkapan emisi karbon Indonesia.

b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi suatu informasi yang memungkinkan investor untuk mempertimbangkan keputusannya dalam berinvestasi dan memprioritaskan perusahaan yang telah melakukan pengungkapan emisi karbon sebagai cara bagi bisnis untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungannya.

c. Bagi Manajemen

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan yang mungkin berdampak pada operasi dan reputasi perusahaan.

2. Penelitian ini dapat membantu manajemen dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi emisi karbon dan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan internal yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu akuntansi yang berfungsi sebagai panduan, pelengkap, terutama untuk penelitian yang berfokus pada pengaruh kemampuan manajerial, kinerja lingkungan, dan dewan komisaris tentang pengungkapan emisi karbon.

